

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari

Nurhumaerah¹, Arifuddin Mas'ud², Ummy Kalsum³

^{1,2,3}. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

nurhumaerah@gmail.com

ABSTRACT

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang dimiliki dan bersumber pada APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi serta *debt service coverage ratio*. Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat menggunakan analisis laporan arus kas sebagai media untuk memberikan penilaian kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan kinerja keuangan pada Dinas PUPR Kota Kendari. Lokasi penelitian ini adalah dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas PUPR. Sedangkan data sekunder sekunder lainnya yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada literatur-literatur, jurnal dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data adalah Analisis data Kuantitatif menggunakan menggunakan metode *Value For Money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomis pada pengelolaan anggaran tahun 2019 sampai 2021 berada dalam kategori ekonomis, kemudian rasio efektifitas pada pengelolaan anggaran pada tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan hasil yang tidak efisien, hal ini disebabkan karena realisasi belanja jauh lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan. Kemudian pada rasio efektivitas pada pengelolaan anggaran tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan hasil dalam kategori efektif, namun rasio efektifitas pada anggaran tahun 2021 menunjukkan hasil dalam kategori tidak efektif, hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan jauh dibawah target pendapatan

Article Info

Article History

Received : March 12th, 2023
Revised : Mey 14th, 2023
Accepted : June 3rd, 2023
Published : Agustus 24nd, 2023

Copyright © 2023 by the author



Keyword: *Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Value For Monay*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan yang baik merupakan upaya dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah. Soraida (2022) menyebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kinerja Sumber Organisasi Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba. Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga/ organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi.

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang dimiliki dan bersumber pada APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi serta *debt service coverage ratio*. Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat menggunakan analisis laporan arus kas sebagai media untuk memberikan penilaian kinerja pemerintah daerah. Kemampuan atau kemandirian pada suatu daerah yang dimaksud adalah sampai sejauhmana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu cara evaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan pengukuran/penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Jika dilihat secara mendalam sebenarnya konsep *Value For Money* bukan sesuatu yang baru, bahkan *Value For Money* merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dari good governance.

Menurut Mardiasmo (2018,131), *Value For Money* (VFM) merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga

hal tersebut merupakan elemen pokok *Value For Money* yang saling terkait. Ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*).

Organisasi sektor publik merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum berupa pelayanan pada bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Pada umumnya organisasi sektor publik bisa dikatakan dengan baik apabila organisasi tersebut dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan mencapai tujuan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif (Kristiani, 2016). Tetapi pada kenyataannya, organisasi sektor publik saat ini kerap sekali dikira oleh publik selaku suatu institusi yang kurang maksimal, kurang produktif, mutu kinerja yang rendah, serta sumber dari pemborosan dana. Perihal inilah yang menimbulkan terdapatnya suatu tuntutan dari publik yang menginginkan suatu sistem pemerintahan yang bersih.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari belum dapat bekerja secara maksimal karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi dan masih cukup banyak keluhan yang disampaikan para masyarakat Kota Kendari. Keluhan tersebut diantaranya seperti perbaikan jalan yang belum maksimal dimana masih terdapat sejumlah ruas jalan yang berlubang yang cukup membahayakan khususnya pengendara. Ada indikasi yang memungkinkan perbaikan atau pemeliharaan jalan tersebut belum maksimal karena penyerapan atau realisasi anggaran yang belum maksimal pula.

2. LITERATURE REVIEW

Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, Mardiasmo (2018:61). Sedangkan menurut Wiratna (2015:28) anggaran adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat secara tepat dan cermat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu satu periode (Harly: 2017). Anggaran yang telah disusun akan digunakan oleh pihak manajemen untuk mengarahkan jalannya kondisi organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar. Mardiasmo (2018:98) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggitingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan diterima dalam masa tersebut. Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode

waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2016:48). Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim Abdul (2016:235) Anggaran merupakan suatu kinerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (Rupiah) selama masa periode tertentu (satu tahun). Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan rencana pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja sebagai alat memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua dari berbagai unit kinerja. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk Rupiah untuk merealisasikan rencana kerja suatu organisasi yang tersusun secara sistematis dalam suatu periode tertentu baik untuk membiayai pengeluaran serta membantu dalam pengambilan keputusan.

Pendapatan

Beberapa sumber menjelaskan mengenai definisi dari pendapatan, para ahli memiliki definisi yang berbeda dari pendapatan. Samryn (2014:07) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan hasil moniter dari pengalihan hak atau barang jasa melalui transaksi penjualan kepada pelanggan. Sedangkan menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011:955) mendefinisikan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, jasa, penggunaan aktiva perusahaan, pihak lain yang menghasilkan keuntungan, royalti dan deviden. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang di jual. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan. Menurut Hery (2013:26) pendapatan merupakan arus aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, penerima barang, pemberian jasa atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Secara konseptual pendapatan dapat diartikan aliran masuk aktiva atau pengurangan hutang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan, Samryn (2014:45). Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan dalam suatu periode.

Tujuan prosedur penyusunan pendapatan menurut Bastian (2009:147) adalah:

1. Memberikan informasi prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda), sehingga dapat diperhitungkan

seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan.

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang menguraikan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Sedangkan menurut Siregar (2017:32) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah SAP menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, Belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung, adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
2. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja bunga
 - c. Belanja subsidi
3. Belanja Modal, merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi belanja menyebutkan bahwa adalah Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat diategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan penambahan penggantian peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Value For Money

Konsep *Value For Money* sangat berbedanya dengan pengertian konsep *time value of money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value of money* mempunyai pengertian bahwa nilai uang dapat berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *Value For Money* mempunyai pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomi merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah. Ekonomi berkaitan dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ekonomi berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

meminimalisir input resources yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimal pada input tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai target, maka efisiensi perbandingan output/input. Output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome atau hasil.

METODOLOGI

Lokasi penelitian ini adalah Dinas PUPR Kota Kendari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari Dinas PUPR Kota Kendari mulai tahun 2019 sampai tahun 2021. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif deskriptif yaitu data yang sudah diolah dan diterbitkan atau digunakan oleh suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa dokumentasi, dimana dapat diperoleh melalui dokumen atau data berupa struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Kendari, Peta Jalan Kota, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2021.

Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Proses analisa data dimulai dengan mengembangkan data-data yang telah didapatkan di lapangan. Data laporan keuangan Pada Dinas PUPR Kota Kendari dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (outcome). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti kinerja semakin buruk (Yulianti, 2015).

1. Tingkat Ekonomis

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- <100% Ekonomis
- = 100% Ekonomis Berimbang
- >100%% Tidak Ekonomis

2. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang ditetapkan).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 tahun 1996, kriteria anggaran belanja sebagai berikut :

- 100% Sangat Efektif
- 90% - 100% Efektif
- 80% - 90% Cukup Efektif
- 60% - 80% Kurang Efektif
- < 60% Tidak Efektif

3. Analisis Efisien Belanja

Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien nya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007:152). Efisien Belanja diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- 100% Tidak Efisien
- 90% - 100% Kurang Efisien
- 80% -90% Cukup Efisien
- 60% - 80% Efisien
- 60% Sangat Efisie

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Ekonomis

Ekonomis memiliki pengertian bahwa perolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah (Spending less). Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang berarti perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam penelitian pengukuran rasio ekonomis menurut Mahsun (2016) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Ekonomi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp) A	Anggaran (Rp) B	Rasio Ekonomi (%) A/B x 100	Kriteria
2019	159.840.574.009	286.834.892.268	55,73%	Ekonomis
2020	133.542.537.540	211.929.574.377	63%	Ekonomis
2021	161.109.941.752	413.631.809.078	39%	Ekonomis

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1 hasil dari perhitungan rasio ekonomis yang menggambarkan analisis kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Berdasarkan rasio ekonomis tahun anggaran 2019-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari telah memenuhi kriteria sangat ekonomis karena mencapai dikisaran <60% yaitu sebesar 55,73%. Tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,27% dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari persentase rasio ekonomis di tahun 2020 yaitu sebesar 63%, namun masih berada dirasio ekonomis dikisaran 60%-80%, sedangkan ditahun anggaran 2021 kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari mengalami penurunan yaitu sebesar 24% dengan persentase nilainya sebesar 39% yang sedikit lebih besar penurunannya disbanding dengan peningkatan tahun lalu, sehingga masuk dalam kriteria sangat ekonomis. Dinas PUPR Kota Kendari dianggap baik dalam kegiatan anggaran pada saat akan memulai pelaksanaan program kegiatan sampai akhir masa pelaksanaannya. Pada program kegiatan anggaran yang terpakai tidak terjadi pemborosan karena anggaran yang terpakai hanya dilakukan untuk keperluan belanja pembangunan jalan dan jembatan serta belanja peningkatan jalan lingkungan.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan capaian output yang maksimum dengan input tertentu. Untuk menghitung rasio efisiensi dalam mengelola keuangan dapat dilihat perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam penelitian pengukuran rasio efisiensi menurut Mahsun (2016) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 2. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari

Tahun	Realisasi Belanja (Rp) A	Realisasi Pendapatan (Rp) B	Rasio Efisiensi (%) A/B x 100	Kriteria
2019	159.840.574.009	9.303.012.400	1718	Tidak Efisien
2020	133.542.537.540	7.199.477.999	1855	Tidak Efisien
2021	161.109.941.752	7.173.397.449	2246	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 2 hasil dari perhitungan rasio efisiensi yang menggambarkan analisis kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Berdasarkan rasio efisiensi tahun anggaran 2019-2021 menunjukkan hasil dengan kriteria tidak efisien, karena melebihi 100%. Pada tahun 2019 hasil rasio efisiensi menunjukkan hasil 1.718%, pada tahun 2020 justru mengalami kenaikan 137% sehingga capaian rasio efisiensi pada tahun 2020 sebesar 1.855%, dan pada tahun 2021 terus mengalami kenaikan hingga mencapai rasio efisiensi sebesar 2.246%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari periode 2019-2021 masih dikatakan tidak efisien, karena hasil perhitungannya jauh lebih besar dari 100%. Menurut Mahsun (2016:187) kriteria efisiensi dinilai efisien apabila suatu perusahaan atau organisasi sector public memperoleh nilai kurang dari 100%. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk yang relative. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sebastian Nicola (2019) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara", dalam penelitian tersebut hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2016 menunjukkan hasil 340%, pada tahun 2017 menunjukkan hasil 319% dan tahun 2018 menunjukkan hasil 379%. Sehingga menunjukkan kinerja keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2018 adalah tidak efisien.

Dinas PUPR Kota Kendari masih sangat jauh dari tingkat efisiensi, hal tersebut sejalan pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aswido selaku Sekretaris Dinas menyatakan bahwa: “Memang kami di Dinas PU Kota Kendari ini jumlah belanja jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan atau pendapatannya, karena item penerimaan/ pendapatan kami tidak banyak sedangkan beban pekerjaan besar apalagi terkait fasilitas umum, sehingga tidak efisien dalam melakukan penganggaran anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan”

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat capaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Untuk menghitung rasio efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat capaian atau disebut realisasi pendapatan. Dalam penelitian pengukuran rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Dinas PUPR Kota Kendari

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp) A	Anggaran Pendapatan (Rp) B	Rasio Efektivitas (%) A/B x 100	Kriteria
2019	9.303.012.400	8.100.000.000	115%	Efektif
2020	7.199.477.999	7.100.000.000	101%	Efektif
2021	7.173.397.449	10.000.000.000	72%	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel 3 hasil dari perhitungan rasio efektifitas yang menggambarkan analisis kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Berdasarkan rasio efektifitas tahun anggaran 2019-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 kinerja keuangan Dinas PUPR Kota Kendari telah memenuhi kriteria efektif dengan persentase sebesar 115% kemudian tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 14% dibandingkan tahun 2019 namun masih dalam kriteria kategori efektif dengan persentase rasio sebesar 101%. Sedangkan rasio efektivitas tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 29% dengan besaran persentase

rasio adalah 72% dan berada dalam kriteria tidak efektif. Menurut Mahsun (2016) jika kriteria efektivitas memperoleh nilai kurang dari 100% maka dianggap tidak efektif.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sebastian Nicola (2019) yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan memperoleh hasil perhitungan rasio efektivitasnya dinyatakan tidak efektif, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa factor seperti kondisi alat-alat berat yang kurang baik, langkanya bahan material dan factor cuaca. Wawancara yang dilakukan dengan Aswido selaku Sekretaris Dinas PUPR Kota Kendari juga sejalan dengan hasil perhitungan rasio efektivitas yang menyatakan bahwa:

“Baik perencanaan anggaran dan realisasi pendapatan selalu kecil dibandingkan belanja modal karena memang Dinas PUPR ini bukan OPD dengan sasaran profitabilitas atau yang memberikan kontribusi PAD tinggi, tapi Dinas PUPR justru mewadahi dalam artian menunjang infrastruktur agar OPD lain yang menjadi sasaran profit atau pendapatan untuk daerah bisa maksimal. Jadi, bisa saya katakan bahwa sekalipun menurut teori bahwa pengelolaan pendapatan anggaran tidak efektif tapi justru bagi kami Dinas PUPR itu sudah efektif”

Dinas PUPR Kota Kendari dianggap baik dalam kegiatan anggaran pada saat akan memulai pelaksanaan program kegiatan sampai akhir masa pelaksanaannya. Pada program kegiatan anggaran yang terpakai tidak terjadi pemborosan karena anggaran yang terpakai hanya dilakukan untuk keperluan belanja pembangunan jalan dan jembatan serta belanja peningkatan jalan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode *value for money* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengukuran rasio ekonomis sudah memenuhi kriteria ekonomis, sedangkan pada pengukuran rasio efisiensi selama tiga tahun berturut-turut memperoleh hasil yang tidak efisien, hal tersebut disebabkan oleh besarnya realisasi belanja berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan yang justru jauh lebih rendah. Dan pada pengujian rasio efektivitas diperoleh hasil bahwa di tahun 2019-2020 sudah memenuhi kriteria efektif sedangkan pada tahun 2021 rasio efektivitas berada pada kategori tidak efektif, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan dibandingkan perencanaan pendapatan. Dinas PUPR Kota Kendari dari segi ekonomis dapat dikatakan telah menggunakan anggarannya dengan baik dalam arti dapat menghemat pengeluaran biaya. Instansi juga diharapkan tetap lebih menghemat lagi dalam pengeluaran biaya agar tingkat ekonomis yang sudah memenuhi kriteria terus mengalami kenaikan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan. Dinas PUPR Kota Kendari dari segi efisiensi disarankan untuk

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya yang masih tidak baik agar menjadi lebih baik. Agar tingkat efiseinsi dapat menjadi baik, Instansi harus lebih menekankan lagi biaya-biaya operasionalnya. sehingga jumlah belanja tidak lebih besar dari jumlah pendapatan. Dinas PUPR Kota Kendari dari segi efektivitas kinerja pengelolaan keuangannya masih dianggap tidak baik. Disarankan agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik.. Agar tingkat efektivitas dapat menjadi baik.

REFERENCES

- Akhir, T. (2011). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang*.
- Akuntansi, Jurnal, & Keuangan, D. A. N. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*
- Anggrawati. (2017) *Konsep Value For Money Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur* .
- Purwiyanti, D. (2019). *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi” (Studi kasus Dinas PU Kota Palu)*. Tesis-Magister Manajemen: Universitas Taddulako.
- Dwinanda, Yosie. (2018) *Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Tesis-Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Halim & Kusufi (2016). *Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*.
- Hamid, A., & Lamuda, I. (2019). *Evaluation of Financial Performance Through Approach To Value For Money Pendekatan Value For Money*. Gorontalo Accounting Journal, 2, 31–41.
- Harly, K., & Afriyenty, M. (2017). *Analisis kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014- 2016)*. Wra, 5(2), 1065.
- I Made, M, & I Ketut J. (2017). *Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran*. (studi kasus: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). Tahun 2016-2016.
- Irmawati, & Rinaldy, R. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015*.

- Jurnal Akunida, 2(2), 14–26. <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/1395> Suryantari, P. D., & Ulupui, I. G. K. A. (2016).
- Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 8(1), 93–99. Jhon Wiley & Sons, I. (2017a). Metode Penelitian Untuk Bisnis (Dedy A. Halim (ed.); Edisi 6). salemba empat. Jhon Wiley & Sons, I. (2017b). Metode Penelitian Untuk Bisnis (Dedy A. Halim (ed.); Edisi 6 bu). salemba empat.
- Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460- 0585. Pengaruh Kebijakan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba, 8, 22
- Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep *Value For Money*. E-Jurnal Akuntansi, 17(2), 1635– 1666. Wigrhayani, N. N. S. W. (2019).
- Kristanti, O. I. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 134.
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis. Jurnal Dinamika Akuntansi, 5(1), 1–11. Liando, H. S., Paul, D., Saerang, E., & Elim, I. (2014). 3 1,2,3. 2(3), 1686–1694.
- Mahsun. (2016) *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mardiasmo. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi https://eprints.umk.ac.id/1974/7/Daftar_Pustaka.pdf.
- Pancanugraha, I. (2015). *Value For Money* Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014. 5, 20–27.
- Purwiyanti (2017). *Kinerja Keuangan Untuk Organisasi Publik*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (n.d.). *Utara Berdasarkan Konsep Value For Money Analysis Of Financial Performance Measurement Of The North Sulawesi Provincial Government Based On The Concept Of Value For Money* Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 781 -788. 8(4), 781–788.
- Purnomo, A., & Wirawati, N. (2015). *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. EJurnal Akuntansi, 11(1), 252–268.
- Renaldi, P. (2021). Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Keuangan Sektor Publik pada Polres Ogan Ilir”. FEB: Universitas Sumatera Selatan. Tahun 2017-2020.

- Ridwan & Anggrawati. (2017) Konsep *Value For Money* Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur. Skripsi—UIN Alauddin, 2017.
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset* <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2719>
- Sari. (2017). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Kabupaten Sumenep*. Tesis--Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Setiawan, A. B., & Gustia, W. (2016). *Analisis Value For Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor*.
- Sri. 2018. *Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Empat Lawang*. Universitas Muhammadiyah.
- Undang-Undang, 2004. Kewenangan dan Prinsip Otonomi Daerah: No. 32
- Winia. (2021). *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau*. Tesis Manajemen Keuangan, FEB: Universitas Islam Riau.
- Zain, Wardiman. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Tahun 2012-2016*